

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan model Edward III, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi antara UPTD Pasar Panorama dengan pedagang sudah dilakukan melalui sosialisasi langsung, surat edaran, serta pertemuan dengan perwakilan pedagang. Namun, intensitas komunikasi belum konsisten, sehingga sebagian pedagang tidak menerima informasi secara merata. Hal ini menyebabkan sebagian aturan belum dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pedagang.

#### **2. Sumber Daya**

Dari aspek sumber daya, kualitas SDM pegawai UPTD dinilai cukup baik, tetapi jumlahnya terbatas sehingga beberapa tugas harus dirangkap. Dari segi finansial, anggaran masih minim sehingga perbaikan sarana prasarana berjalan lambat. Kondisi sarana dan prasarana seperti drainase, lahan parkir, fasilitas kebersihan, dan toilet umum belum memadai untuk menunjang aktivitas perdagangan yang padat. Selain itu, aspek waktu pelaksanaan sosialisasi dan penertiban belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

#### **3. Disposisi Pelaksana**

Disposisi pelaksana pada UPTD Pasar Panorama tergolong positif. Pegawai menunjukkan sikap ramah, motivasi tinggi, serta komitmen dalam

memberikan pelayanan. Namun, kelemahan utama terletak pada konsistensi penegakan aturan. Penertiban pedagang kaki lima tidak dilakukan secara berkelanjutan, dan pengawasan kebersihan kurang tegas, sehingga aturan seringkali tidak berjalan efektif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Secara formal, struktur birokrasi pengelolaan Pasar Panorama sudah jelas dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2020 serta SOP pelaksanaan. UPTD juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bapenda. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa koordinasi yang belum maksimal dan prosedur administrasi yang dianggap berbelit oleh pedagang.

Jadi secara umum Implementasi kebijakan penataan Pasar Panorama Kota Bengkulu belum berjalan optimal. Keempat indikator Edward III menunjukkan adanya capaian positif, tetapi juga kelemahan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini berdampak pada belum tercapainya kondisi pasar yang tertib, bersih, dan nyaman sebagaimana tujuan kebijakan.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Komunikasi

UPTD perlu meningkatkan intensitas sosialisasi secara rutin dan menyeluruh, dengan memanfaatkan berbagai media seperti papan pengumuman, media sosial, serta pertemuan berkala, agar semua pedagang

mendapatkan informasi yang sama dan jelas.

## 2. Penguatan Sumber Daya

Pemerintah daerah perlu menambah jumlah pegawai UPTD serta memberikan pelatihan teknis agar kompetensi semakin meningkat. Dari sisi finansial, diperlukan peningkatan alokasi anggaran khusus untuk perbaikan infrastruktur pasar. Fasilitas dasar seperti drainase, parkir, toilet, dan tempat sampah perlu segera diperbaiki dan ditambah jumlahnya. Selain itu, jadwal penertiban dan sosialisasi harus dibuat lebih konsisten dan berkelanjutan.

## 3. Peningkatan Disposisi Pelaksana

Pegawai UPTD perlu meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam menegakkan aturan, terutama terkait penertiban PKL dan kebersihan. Perlu adanya standar penegakan yang jelas agar tidak terjadi diskriminasi atau inkonsistensi dalam penerapan aturan.

## 4. Perbaikan Struktur Birokrasi

Prosedur administrasi seperti perpanjangan izin dan pengurusan sewa kios perlu disederhanakan agar tidak menyulitkan pedagang. Selain itu, koordinasi antarinstansi harus ditingkatkan melalui forum rutin lintas dinas, sehingga penegakan aturan dapat dilakukan lebih konsisten dan berkelanjutan.

Secara umum Implementasi kebijakan penataan pasar perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan perbaikan pada keempat aspek tersebut, diharapkan Pasar Panorama dapat menjadi pasar tradisional yang lebih tertib, bersih, nyaman,

dan modern, sesuai dengan harapan pemerintah daerah maupun pedagang.